



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDRIZAL
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, ANALISIS DAN EVALUASI
3. NHK : 124884

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/61 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 317.750.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Z Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA MEGA PRO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.750.000
4. MOBIL, DAIHATSU GRAND MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 98.140.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 225.736.735

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.441.626.735

III. HUTANG Rp. 334.685.391

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.106.941.344

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.